



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: PLT. Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 23 Mei 2016.
Pukul	: 10.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK RI Tahun 2015 2. Lain-Lain
Hadir	: 27 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Plt. Kepala Perpustakaan Nasional beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK RI Tahun 2015

- a. Perpustakaan Nasional RI menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada Perpustakaan Nasional RI sampai dengan semester II Tahun 2015, terkait dengan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2014 terdapat permasalahan dan nilai temuan sebagai berikut:

No	Kategori Temuan	Jumlah Temuan	Nilai Temuan (Rp)
1	Sistem Pengendalian intern	6 temuan	3.113.955.900,-
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	9 temuan	943.834.471,-
Jumlah		15 temuan	4.057.790.371,-

- b. Terhadap permasalahan dan nilai temuan sebagaimana huruf a di atas, Perpustakaan RI telah menindaklanjutinya secara keseluruhan sesuai rekomendasi dan telah menyampaikan bukti-bukti tindak lanjut kepada BPK RI. Selanjutnya Perpustakaan RI menyampaikan bahwa dari permasalahan dan temuan di atas terdapat temuan yang berpengaruh langsung terhadap tata kelola keuangan, yaitu belum tertibnya pencatatan aset koleksi Perpustakaan Nasional yang berasal dari pelaksanaan UU No.4 Tahun 1990 tentang SSKCKR; dan pencatatan aset tanah UPT Perpustakaan Bung Karno melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Hal ini terjadi karena terdapat beberapa hambatan sebagai berikut:
- 1) Kesulitan dalam menaksir harga bahan perpustakaan yang tidak mencantumkan harga buku, karena kewenangan menaksir harga ada pada Kemenkeu RI.
 - 2) Sertifikat tanah UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno masih atas nama Pemerintah Kota Blitar.
- c. Terkait permasalahan dan hambatan sebagaimana huruf b di atas, Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan RI untuk:
- 1) Tetap melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI untuk memutuskan harga buku koleksi Perpustakaan Nasional RI, dan memastikan waktu penyelesaiannya.
 - 2) Segera melakukan proses balik nama sertifikat tanah UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
 - 3) Melakukan langkah strategis sesuai peraturan perundang-undangan agar temuan pada tahun 2014 tidak terulang kembali.
- d. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI agar pada tahun-tahun yang akan datang dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Lain-lain

Penghematan/Pemotongan APBN Perpustakaan Nasional RI TA 2016

- a. Perpustakaan RI menyampaikan bahwa berdasarkan Surat menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 mei 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja K/L TA 2016, Perpustakaan RI pada APBN TA 2016 dihemat/dipotong sebesar Rp.88.832.383.800,- (*Delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga*

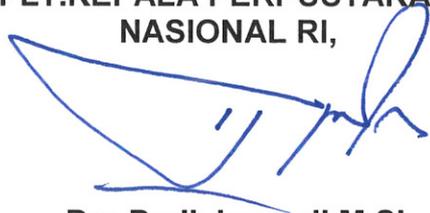
ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari Efisiensi Belanja Operasional dan Efisiensi Belanja Lainnya.

- b. Berdasarkan huruf a diatas, Pagu APBN TA 2016 pada Perpustakaan RI yang semula Rp. 701.101.136.000,- menjadi Rp. 612.268.752.200,-. Adapun terkait rincian penghematan APBN TA 2016, Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan RI untuk menyampaikan data revisi atas bahan RDP hari ini, untuk selanjutnya disampaikan secara resmi kepada Komisi X DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 26 Mei 2016.
- c. Terkait penghematan/pemotongan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI agar:
 - 1) Penghematan/pemotongan tidak merubah rencana strategis program pengembangan perpustakaan yang telah ditentukan dan tidak mengurangi kualitas kinerja Perpustakaan RI, khususnya program minat baca dan pengembangan SDM.
 - 2) Besarnya koleksi Perpustakaan RI harus dikorelasikan dengan peningkatan minat baca masyarakat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.15 WIB

**PLT.KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL RI,**



Drs.Dedi Junaedi,M.Si

KETUA,



Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra,M.M